

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”, maka penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitanya dengan penelitian yang akan penulis teliti, antara lain :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaffar Dalam Ndraha mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara.

Selanjutnya menurut Musanef dalam Syafiie, ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Brasz dalam Syafiie ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Sehingga melihat dari definisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang berlaku pada Negara.

2. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut..

Menurut Ndraha pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Menurut Apter, pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (Dalam Syafiie,2005:21).

Menurut Rasyid dalam Giroth(2004:65) adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses penegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan member kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan(service), pemberdayaan(powerment) dan pembangunan (development). (dalam Rauf,2014:28)

Rasyid (1998;14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah :

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembrontakan dari dalam yang dapat mengulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jadi menurut konsep-konsep yang telah di jelaskan mengenai pemerintahan dan pemerintah dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah sekelompok organisasi kenegaraan yang memiliki kekuasaan yang berkewajiban melindungi kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, sedangkan pemerintah adalah badan atau lembaga dalam pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka atau upaya mencapai tujuan Negara yang telah di tentukan oleh undang-undang yang berlaku.

3. Konsep Pemerintah

Sedangkan menurut Ndraha (2003 : 5) pemerintah adalah sebuah proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Kemudian menurut Syafiie (2011;4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada 4 (empat) unsure yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Menurut Salam (2007;36) Pengertian pemerintah memiliki banyak arti:

- a. Pengertian pemerintah dalam arti luas yaitu pemerintah berdasarkan apa tugas yang dilaksanakannya

- b. Pengertian pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu kelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas intraksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga intraksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Salam. 2007 ; 34)

4. Konsep Evaluasi

Dalam hal pelaksanaan peran yang dijalankan oleh ketua Rukun Tetangga (RT) pada suatu lembaga pemerintahan, maka dalam pelaksanaannya diperlukan evaluasi untuk mengukur kinerja yang telah berjalan, penulis mengambil beberapa definisi tentang teori evaluasi antara lain :

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku konsep administrasi dan administrasi diindonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:126).

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat

disimpulkan dengan analisa ahir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Menurut Nurcholis (2004:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaannya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Indiahono (2009:145) evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek : aspek proses dan hasil.

Dari beberapa pengertian Evaluasi diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya Evaluasi dapat kita jadikan sebagai suatu penilaian terhadap keseluruhan tugas/fungsi yang diperankan oleh RT, sehingga hasil dari penilaian tersebut bias dijadikan bahan untuk memeperbaiki kinerja RT pada masa yang akan datang.

5. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005:7)

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Rose (dalam Agustino, 2008: 7) kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkomproming sebagai keputusan yang berlainan.

Kemudian Kebijakan publik menurut James Anderson (dalam Agustino, 2008;7) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Hogword dan Guns menyatakan bahwa terdapat sepuluh istilah kebijakan dalam pengertian modern yaitu :

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan
3. Sebagai proposal spesifik
4. Sebagai keputusan pemerintah
5. Sebagai sebuah program

6. Sebagai otoritasi formal
7. Sebagai output
8. Sebagai hasil (outcome)
9. Sebagai teori dan model
10. Sebagai sebuah proses (Dalam Indihino, 2009:17)

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat secara terencana dengan tujuan agar dilaksanakan oleh seseorang/sekelompok orang. Hal tersebut juga dapat dilakukan oleh RT.

6. Konsep Peranan

Agar ketua RT aktif didalam kehidupan bermasyarakat ketua RT harus berperan didalam masyarakat tersebut. Sehingga ketua RT dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Stotgil (Dalam Giroth, 2004:25), memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Berdasarkan pengertian peranan diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap RT lebih dikaitkan dengan sifat-sifat individu dari seorang RT.

7. Konsep Tugas

Dengan adanya bentuk pengurusan RT akan dapat memberi ketegasan dan kejelasan organisasi, mulai dari penetapan proses tugas seperti melapor, kepada siapa melapor dan adanya mekanisme koordinasi yang formal sehingga pola interaksi dapat diikuti.

Definisi pelaksanaan tugas Menurut Moekijat (1998:2) seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Menurut Dale Yoder Dalam Moekijat (1998:9), "*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).

Sementara Menurut Siagian (2003:126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

8. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Mengutip istilah yang dikemukakan oleh Selo Soemartjan (Dalam Poernomo, 2003:146), buku ini memaknai istilah "lembaga kemasyarakatan",

menurut pendapat beliau istilah “lembaga” kecuali penunjukan kepada suatu bentuk juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan yang menjadi cirri dari lembaga kemasyarakatan itu.

Menurut Soedjono Soekarno (Dalam Poernomo, 2003:145) kelembagaan sosial atau kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berkisar pada satu pokok kebutuhan manusia. Himpunan norma tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain kelembagaan sosial terdiri dari himpunan norma dengan keterkaitan yang erat dan sistematis membentuk piranti untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Gillin dan Gillin dalam karyanya yang berjudul “ciri umum lembaga kemasyarakatan” menguraikan sebagai berikut :

- a. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
- b. Semua lembaga kemasyarakatan mempunyai kekekalan tertentu. Sebuah sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan apabila telah memenuhi waktu yang lama.
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
- d. Lembaga kemasyarakatan memiliki alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.

- e. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari kelembagaan kemasyarakatan.
- f. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak, untuk merumuskan tujuan dan keperluan lainnya.

Sedangkan lembaga kemasyarakatan menurut Soekanto (Dalam Rauf, 2005:8), adalah himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan suatu organisasi yang memiliki norma-norma dan tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya, dan hal tersebut juga berlaku bagi RT yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan dan memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

9. Konsep Organisasi

Dalam menjalankan peran RT maka diperlukan suatu organisasi yang dapat menjalankan peran dari pada RT dalam membantu kelancaran tugas kelurahan/desa.

Menurut Argyris (1964:35) organisasi adalah organisasi-organisasi biasanya dibentuk orang guna mencapai sasaran-sasaran yang dapat dicapai terbaik secara kolektif. (Dalam Winardi,2003:2).

Menurut H.Schein (1980:12-15) semua organisasi memiliki empat macam karakteristik sebagai berikut :

1. Koordinasi upaya

2. Tujuan umum bersama
3. Pembagian kerja
4. Hierarki otoritas (Dalam Winardi,2003:27)

Menurut Etzioni (1985:3) organisasi adalah unit sosial (pengelompokan manusia) yang segala dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Artinya bahwa suatu organisasi seperti RT haruslah memiliki suatu struktur organisasi yang dapat menjalankan peran RT dengan baik, karena dari struktur itu akan tampak adanya pembagian yang jelas dalam pelaksanaan peran RT.

Menurut Sufian (2005:193) mengatakan “struktur organisasi akan nampak menjadi jelas dan tegas apabila digambarkan dalam bagan organisasi”.

Struktur organisasi Menurut Robbins (Dalam Winardi 20003:6) mengatakan “merupakan proses menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa yang melapor, kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti”.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya suatu organisasi RT sangatlah penting didalam masyarakat kerana RT merupakan organisasi terdekat masyarakat dan menjadi tempat pengaduan pertama masyarakat dan juga sebagai tempat aspirasi masyarakat. Oleh karnanya RT merupakan organisasi yang memiliki tujuan yang akan menjadikan masyarakat kearah yang lebih baik.

10. Konsep Kepemimpinan

Dalam proses pelayanan peran RT diperlukan kepemimpinannya, adapun definisi kepemimpinan menurut (Pamudji, 20005 : 6) antara lain :

- a. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah kepada sistem dan mekanisme kerja;
- b. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu sedangkan manajemen merupakan fungsi status atau wewenang (authority); jadi kepemimpinan menekankan kepada pengaruh terhadap pengikut (wibawa) sedangkan manajemen menekankan kepada wewenang yang ada;
- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada pada dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk memperahkan dana dan daya (funds and forces) yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif;
- d. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan pemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ketercapainnya tujuan organisasi, sedangkan manajemen mengarah kepada tercapainya kepada tujuan organisasi secara langsung; sifatnya selalu kolektif, sebab melayani kepentingan peroranganpun asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan umum.

Menurut Stogdill (1974) mempetakan definisi kepemimpinan adalah sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok.
- b. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat.
- c. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan

- d. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi.
- e. Kepemimpinan sebagai bentuk bujukan.
- f. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan.
- g. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi.
- h. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan.
- i. Kepemimpinan sebagai awal struktur. (Dalam Sulistiyani,2004:77)

Dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan sangat penting. Pengawasan menurut Soehino, dalam Sunindhia, (1987:53) adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah-daerah otonom dan oleh pemerintahan pusat dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Kepemimpinan menurut Syafiie (2009;1) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

11. Konsep Rukun Tetangga

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam melaksanakan roda pemerintahannya, pemerintahan pusat dibantu oleh pemerintahan daerah, sehingga masalah-masalah pemerintahan tidak hanya terbebani oleh pemerintahan saja.

Menurut Muhammad Hatta, pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat di kota, desa, dan daerah (Dalam Rosidin, 20005:39).

Dalam melaksanakan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah dibantu oleh instansi-instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Antara lain lembaga Rukun Tetangga (RT). Namun didalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa lembaga Rukun Tetangga tidak termasuk kedalam sistem pemerintahan, realita lembaga Rukun Tetangga ini merupakan bagian yang tidak terlepas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan/desa. (Dalam Rauf, 2005:6).

Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah diindonesia dibawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya (Dalam Eikipedia Bahasa Indonesia)

Rukun Tetangga menurut Soekanto adalah paguyuban karena tempat tinggal (*Gemeinschaft of place*) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong menolong. (Dalam Rauf, 2005:8).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan/desa, serta diatur dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 14 RT/RW mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dan kelembagaan RT/RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Dari keempat tugas diatas, maka terlihat bahwa pengurus RT dan RW memiliki tugas yang cukup berat, untuk itu tentunya dituntut kerjasama yang baik antara sesama pengurus dan antara pengurus dengan anggota RT/RW. Atau masyarakat setempat agar segala tugas-tugas berat yang diembankan oleh masyarakat dan pemerintah kepada pengurus RT tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan lancar dan baik.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan juga mengatur tentang tugas pokok Rukun Tetangga antara lain :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- c. Memelihara kerukunan hidup warga dan
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Dari ketujuh tugas pokok diatas , maka terlihat bahwa pengurus RT dan RW memiliki tugas yang cukup berat, untuk itu tentunya dituntut kerjasama yang baik antara sesama pengurus dan antara pengurus dengan anggota RT/RW. Atau masyarakat setempat agar segala tugas –tugas berat yang diembankan oleh masyarakat dan pemerintah kepada pengurus RT tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan lancar dan baik.

12. Konsep Masyarakat

Yang menjadi objek dalam pelaksanaan tugas RT ini adalah masyarakat. Menurut Linton (Dalam Rauf,2005:4) masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dengan jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka mengorganisasikan diri dan sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan social dengan batas-batas yang jelas.

Sedangkan menurut Nadel (Dalam Rauf, 2005:5) masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang terikat tetap dan bersifat agak kekal dan stabil.

Soekanto (2001:126) menyatakan bahwa “dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok social, baik yang kecil seperti kelompok keluarga, ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat, desa, masyarakat kota bangsa”.

Menurut S.Pamudji (Dalam Rauf, 2001:4) sikap mental dan cara hidup para warga kota (baik yang sudah lama menetap maupun pendatang baru) harus “dikota” atau dibuat “urbanized” sehingga serasi dengan tuntutan suasana kehidupan kota. Hal ini dapat ditempuh dengan pemberian pendidikan dan pembinaan masyarakat kota, RT dapat memberikan bantuannya.

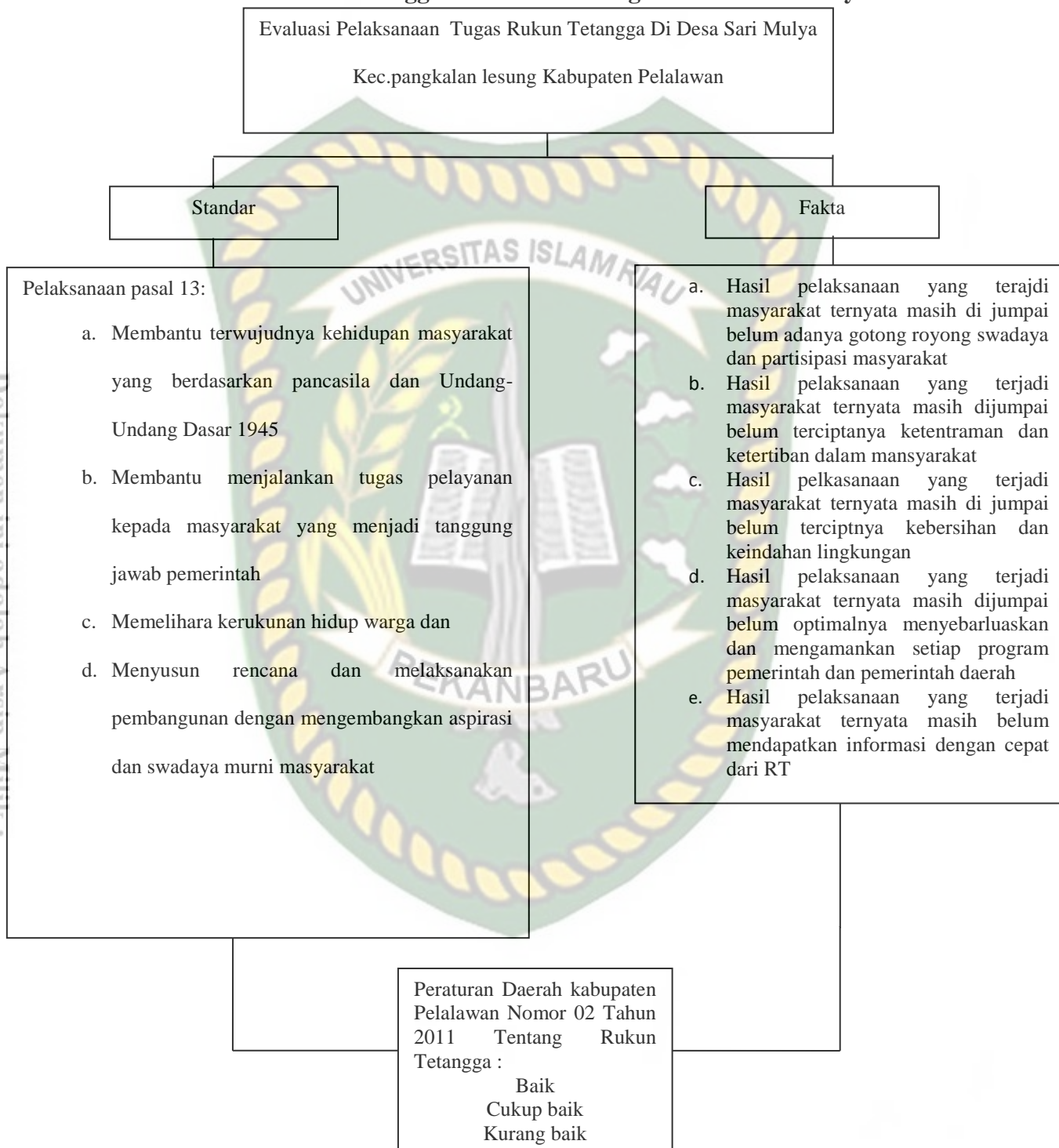
Berdasarkan pengertian masyarakat diatas dapat diambil suatu asumsi bahwa masyarakat merupakan bagian terpenting dalam RT , tanpa adanya masyarakat RT tidak dapat melaksanakan tugasnya dan tidak dapat menjalankan fungsinya.

B. Kerangka Pikir

Dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk itu tentunya dituntut kerjasama yang baik antara sesama pengurus dan antara pengurus dengan anggota RT. Atau masyarakat setempat agar segala tugas-tugas berat yang diemban oleh masyarakat dan pemerintah kepada pengurus RT tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan lancar dan baik.

Selanjutnya di sini dapat dilihat bagan dari kerangka pikir ini yaitu :

Gambar 2.1 : Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Desa Sari Mulya



Sumber : Modifikasi Penelitian 2017

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, penulis mengambil Hipotesis sebagai berikut :

Apabila pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilaksanakan dengan baik maka berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Rukun Tetangga dapat berkurang.

D. Konsep Operasional dan Overasional Variabel

1. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis memaparkan penjelasan tentang Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga, yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi dalam penelitian ini adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan
2. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
5. Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang saling berhubungan satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama dan mempunyai tujuan tertentu.
6. Penduduk setempat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga yang bersangkutan.
7. Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tugas dan fungsinya yaitu membantu pemerintah Desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. (Sia gian 2003:126)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga (RT)	<ul style="list-style-type: none"> Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 	a. Menciptakan lingkungan yang harmonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi b. Masyarakat tahu dengan hak dan kewajibannya	Ordinal
		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat 	a. menampung aspirasi masyarakat. b. melakukan kegiatan-kegiatan yang positif membersihkan lingkungan dengan mengadakan program gotong-royong	Ordinal
		<ul style="list-style-type: none"> Memelihara kerukunan hidup warga. 	a. membersihkan lingkungan dan menjaga Kenyamanan lingkungan dengan menerapkan siskamling b. Menyelesaikan perselisihan antar warga	Ordinal

		<ul style="list-style-type: none"> Membantu pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat. b. melayani masyarakat apabila memerlukan bantuan 	Ordinal
--	--	---	---	---------

Sumber : Modifikasi Penulis, 2017

D. Teknik Pengukuran

Ada pun ukuran yang di berikan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Evaluasi pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dapat di lakukan pengukuran variabel sebagai berikut :

Baik : Apa bila seluruh indikator variable berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden >68%-100%.

Cukup Baik : Apa bila dua atau tiga indikator variable berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban >34%- 67%

Kurang Baik : Apa bila hanya satu indikator variable berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor dengan jawaban responden >0%-33%.

Kategori pengukuran pelaksanaan tugas RT menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan adalah Dengan indikator sebagai berikut :

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara.

Ukuran Penilaiannya adalah :

Baik : Apabila RT mengikutsertakan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang harmonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi atau persentase rata-rata >68%-100%.

Cukup Baik : Apabila RT jarang mengikutsertakan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang harmonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi atau persentase rata-rata >34%- 67%

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali mengikutsertakan masyarakat terciptanya lingkungan yang harmonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi atau persentase rata-rata >0%-33%.

2. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah

Baik : Apabila RT ikut membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat membantu memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat, melayani masyarakat apabila memerlukan bantuan dalam permohonan pembuatan KTP dan surat keterangan miskin atau persentase rata-rata >68%-100%.

Cukup Baik : Apabila RT jarang membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat membantu memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat, melayani masyarakat apabila memerlukan bantuan dalam permohonan pembuatan KTP dan surat keterangan miskin atau persentase rata-rata >34%- 67%

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat membantu memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat, melayani masyarakat apabila memerlukan bantuan dalam permohonan pembuatan KTP dan surat keterangan miskin atau persentase rata-rata >0%-33%.

3. Memelihara kerukunan hidup warga

Ukuran penilaiannya adalah :

Baik : Apabila RT membersihkan lingkungan menjaga Kenyamanan lingkungan dengan menerapkan siskamling, menyelesaikan perselisihan antar warga atau persentase rata-rata >68%-100%.

Cukup Baik : Apabila RT jarang ikut serta membersihkan lingkungan dan menjaga Kenyamanan lingkungan dengan menerapkan siskamling, menyelesaikan perselisihan antar warga atau persentase rata-rata >34%- 67%

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali ikut serta membersihkan lingkungan menjaga Kenyamanan lingkungan dengan menerapkan siskamling, menyelesaikan perselisihan antar warga atau persentase rata-rata >0%-33%.

4. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat

Baik : Apabila RT ikut menampung aspirasi masyarakat.

melakukan kegiatan-kegiatan yang positif membersihkan lingkungan dengan mengadakan proqram gotong-royong atau persentase rata-rata >68%-100%.

Cukup Baik : Apabila RT jarang menampung aspirasi masyarakat

melakukan kegiatan-kegiatan yang positif membersihkan lingkungan dengan mengadakan proqram gotong-royong atau persentase rata-rata >34%- 67%.

Kurang Baik : Apabila RT tidak menampung aspirasi masyarakat

melakukan kegiatan-kegiatan yang positif membersihkan lingkungan dengan mengadakan proqram gotong-royong atau persentase rata-rata >0%-33%.